



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**STRATEGI CINA UNTUK MENEGASKAN STATUSNYA
SEBAGAI REGIONAL HEGEMON TERHADAP VIETNAM DAN
FILIPINA DALAM KASUS LAUT CINA SELATAN**

Skripsi

Diajukan untuk Ujian Sidang Jenjang Sarjana
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Oleh

Okyo Maretto Prayoga

2010330057

Bandung

2017



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**STRATEGI CINA UNTUK MENEGASKAN
STATUSNYA SEBAGAI REGIONAL HEGEMON
TERHADAP VIETNAM DAN FILIPINA DALAM
KASUS LAUT CINA SELATAN**

Skripsi

Oleh
Okyo Maretto Prayoga
2010330057

Pembimbing
Dr. I Nyoman Sudira, Drs., M.Si.

Bandung

2017

Pernyataan

Nama : Okyo Maretto Prayoga
NPM : 2010330057
Jurusan/Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional
Judul : Strategi Cina Untuk Menegaskan Statusnya
Sebagai Regional Hegemon Terhadap Vietnam dan
Filipina Dalam Kasus Laut China Selatan.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 4 Januari 2017

Okyo Maretto Prayoga

Abstrak

Nama : Okyo Maretto Prayoga

NPM : 2010330057

Judul : Strategi Cina Untuk Menegaskan Statusnya Sebagai Regional Hegemon Terhadap Vietnam dan Filipina Dalam Kasus Laut China Selatan.

Penelitian ini berusaha menjawab pertanyaan penelitian mengenai bagaimana Cina menerapkan dominasinya terhadap Vietnam dan Filipina di Laut Cina Selatan. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teori realisme ofensif oleh John J. Mearshimer yang diikuti dengan konsep “teori ancaman Cina” dan konsep mengenai kondisi-kondisi yang memungkinkan terjadinya konflik dari Patrice Van Evera.

Cina dalam kepemimpinan Deng Xiaoping mengalami revolusi internal yang mentransformasi Cina menjadi negara dominan di kawasan Asia. Cina menjadi negara dengan perekonomian terbesar di dunia. Fenomena ini mengundang pendapat para pengamat untuk melihat naiknya Cina menjadi negara dominan, yang terkandung dalam teori Ancaman Cina. Laut Cina Selatan menjadi ajang bagi Cina untuk mempraktekan pengaruhnya. Kasus ini menjadi sumber ketegangan terbesar di kawasan Asia Tenggara, Vietnam dan Filipina menjadi negara kompetitor yang harus menghadapi Cina di kasus ini. Ketegangan yang dipraktekan Cina di wilayah perairan ini menjadi kekhawatiran dunia. Guna meredam kekhawatiran dan gagasan ancaman Cina tersebut, Presiden Hu Jintao menyatakan bahwa pertumbuhan yang dialami Cina akan menjadi proses yang damai. Tetapi jika dilihat dari fakta lapangan, pernyataan ini dapat dianggap berkontradiksi.

Sebagai pemain di kasus ini, Vietnam dan Filipina mengalami tekanan politik secara konstan dari Cina. Klaim Cina yang didasari oleh konsep “nine dash line” mencakup wilayah kedaulatan maritim Vietnam dan Filipina yang telah ditentukan yang UNCLOS dalam Zona Ekonomi Eksklusif. Kasus sengketa ini diwarnai serangkaian tindakan agresif Cina terhadap kapal-kapal Vietnam dan Filipina di Laut China Selatan. Cina menganggap seluruh aktifitas perairan yang dilakukan di Laut China Selatan merupakan sebuah tindakan pelanggaran kedaulatan. Sebagai negara dominan di kasus sengketa ini Cina tidak segan-segan menyatakan kepentingan nasionalnya terhadap laut ini. Kasus ini mengundang ketertarikan saya untuk melakukan penelitian tentang bagaimana sebuah negara dominan mempraktekan kepentingan nasionalnya dan juga usahanya dalam politik internasional untuk mencapai status hegemoni regional.

Abstract

Name : Okyo Maretto Prayoga

NPM : 2010330057

Title : Chinese Strategy to Assert Its Status As Regional Hegemony Towards Vietnam and Philippines in the South China Sea.

This study tried to answer the research questions about how China is implementing its dominance against Vietnam and Philippines in the South China Sea. This research is conducted qualitatively by using the theory of offensive realism by John J. Mearshimer, that include concept of “China Threat Theory” and concepts from Patrice Van Evera about the conditions that allow the conflict.

China under the leadership of Deng Xiaoping experienced an internal revolution that transformed China into the dominant country in the region. China became the country with the largest economy in the world. This phenomenon invites the opinion from the observers to see the rise of China became dominant, embodied in the concept of China threat theory. South China Sea is an opportunity for China to practice its influence. This case became the biggest source of tension in Southeast Asia, Vietnam and Philippines become the competitor that must face China in this case. Assertiveness that China practiced in territorial waters became the world's concern. In order to reduce the concerning situations and the ideas of China threat, President Hu Jintao stated that the growth that China experienced will be peaceful. But it seen from the facts, this statement can be considered contradictory.

As a participant in this case, Vietnam and Philippines experienced constant political pressure from China. China claims is based on the concept of "nine dash line", that includes the maritime territorial sovereignty of Vietnam and Philippines predetermined by UNCLOS as the Exclusive Economic Zone. The dispute case filled with a series of aggressive acts by China against the ships of Vietnam and Philippines in the South China Sea. China considers all the activities that carried out in the waters of the South China Sea is an act of infringement of sovereignty. As the dominant country in this dispute case, China did not hesitate to assert their national interests towards the waters. This case invites my interest to do the research on how a dominant country practice their national interests and also its efforts in international politics to achieve the status of a regional hegemony.

Kata Pengantar

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan saya kekuatan dan ketabahan selama proses penyusunan tugas akhir skripsi yang berjudul, “Strategi China Untuk Menegaskan Statusnya Sebagai Regional Hegemon Terhadap Vietnam dan Filipina Dalam Kasus Laut China Selatan”.

Penulisan skripsi ini diajukan sebagai sebuah penelitian dan prasyarat untuk memperoleh gelar sarjana dari Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katholik Parahyangan, Bandung.

Tujuan dari penulisan penelitian ini adalah untuk memaparkan peran Cina di kasus sengketa Laut Cina Selatan sebagai salah satu contoh kasus dimana Cina dapat mempraktekan dominasinya di kawasan. Saya harap penelitian ini dapat memberikan atau memperkaya informasi bagi para akademisi yang memiliki ketertarikan pada konflik Laut Cina Selatan, yang kita ketahui telah mewarnai situasi politik Asia Tenggara periode 90an.

Dalam proses penulisan penelitian ini, penulis kerap menemukan tantangan dan kendala, tetapi berkat rahmat yang diberikan oleh Allah SWT dan dukungan besar dari keluarga dan sahabat penulis dapat menyelesaikannya. Ucapan terimakasih juga saya sampaikan kepada Dr. I Nyoman Sudira selaku pembimbing yang telah dengan sabar membantu saya dalam menyelesaikan penelitian, kepada orang tua, dan kepada teman-teman yang telah memberikan doa dan dukungan. Penulis menyadari bahwa penelitian ini tentunya tidak lepas dari kekurangan, sehingga penulis mengharapkan kritik, saran dan rekomendasi yang dapat menjadikan proses perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini.

Bandung, 3 Januari 2016

Okyo Maretto Prayoga

DAFTAR ISI

Abstrak.....	i
Abstract.....	ii
Kata Pengantar.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	3
1.2.1 Pembatasan Masalah.....	7
1.2.2 Perumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
2.1.1 Tujuan Penelitian	8
1.3.2 Kegunaan Penelitian	8
1.4 Kajian Literatur.....	8
1.5 Kerangka Pemikiran	9
1.6 Metode dan Teknik Pengumpulan Data	18
1.6.1 Metode Pengumpulan Data.....	18
1.6.2 Teknik Pengumpulan Data	18
1.7 Sitematika Pembahasan.....	19
BAB II POSISI VIETNAM DAN FILIPINA DALAM KONFLIK LAUT CINA SELATAN	19
2.1 Posisi Vietnam dalam konflik Laut Cina Selatan	20
2.1.1 Manuver Politik Vietnam dan Tekanan Cina.....	21
2.1.2 Manuver dan Modernisasi Militer Vietnam.....	25
2.2 Posisi Filipina dalam konflik Laut Cina Selatan	29
2.2.1 Manuver Politik Filipina dan Tekanan Cina.....	30
2.2.2 Manuver dan Modernisasi Militer Filipina.....	35
2.3 Kepentingan Vietnam dan Filipina Terhadap Nilai Strategis Laut China Selatan.	38
BAB III.....	44

STRATEGI CINA DALAM MENEGASKAN HEGEMONINYA TERHADAP VIETNAM DAN FILIPINA DI LAUT CINA SELATAN.....	44
3.1 Motivasi Ekonomi dan Manuver Militer Cina Terhadap Laut Sengketa.	45
3.1.1 Pertumbuhan Ekonomi dan Ketahanan Energi.....	46
3.1.2 Kapabilitas dan Modernisasi Militer	51
3.2 Inisiatif Politik dan Kepentingan Strategis Cina di Laut Sengketa.....	60
BAB IV.....	67
KESIMPULAN	67
DAFTAR PUSTAKA	71

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam sedekade terakhir Cina telah diakui menjadi salah satu negara superpower di dunia. Fenomena perkembangan negara ini telah diteliti dalam banyak perspektif, ekonomi, militer, politik, maupun budaya. Dalam dunia hubungan internasional lahirnya negara-negara superpower bukanlah tanpa gesekan-gesekan kepentingan politik atau kepentingan nasional di antara negara-negara tetangganya.

Bangkitnya Cina tidak terlepas dari peran *Deng Xiaoping*, presiden yang menggantikan *Mao Zedong*. Dalam kepemimpinan *Deng Xiaoping* Cina berhasil membuka hubungan baik dengan dunia politik internasional dalam bentuk reformasi baik politik ataupun ekonomi yang dilakukannya pada Desember 1978.¹ Reformasi politik dan ekonomi ini bertujuan untuk membuka diri pada perdagangan internasional yang lebih potensial. Hasilnya adalah Cina yang berkembang pesat secara politik dan ekonomi pada saat ini. Untuk mengusung pertumbuhan dan perkembangan, suatu negara membutuhkan interaksi negara lain dalam hal memenuhi kebutuhan material untuk bertahan hidup. Tahun 2007 Cina menjadi negara dengan ekonomi terbesar ke tiga dan negara dengan nilai perdagangan

¹ Zheng Bijian, *China's "Peaceful Rise" to Great-Power Status*, 2005, diakses dari website: <<http://www.foreignaffairs.com/articles/61015/zheng-bijian/chinas-peaceful-rise-to-great-power-status>> tanggal 10 Maret 2016.

terbesar ke dua di dunia, menggeser posisi Jerman.² Tahun 2008, GDP Cina mencapai 4.5 trilyun dollar AS, mendekati posisi Jepang sebagai negara perekonomian terbesar.³

Dalam hubungan internasional, Realis berasumsi bahwa politik internasional adalah sebuah sistem yang anarki,⁴ negara adalah aktor sentral dan rasional yang berfungsi dan berinteraksi semata untuk memperebutkan kekuasaan atau *struggle for power*. Aktor rasional ini memiliki tujuan untuk mencapai keamanan nasional, untuk bertahan hidup, mencapai kestabilan dan ketertiban internasional.⁵ Secara keseluruhan tujuan tersebut dapat dicapai bila negara memiliki *power*.⁶ Kebangkitan Cina kini dianggap telah menjadi kekuatan besar di dunia yang akan berpotensi menimbulkan konflik. Seringkali disebutkan Cina berupaya membendung atau menyaingi pengaruh politik Amerika Serikat dikawasan Asia. Dalam penelitian mengenai fenomena serupa, QianQian Liu dari Universitas Cambridge⁷ mengatakan:

² Jisi Wang, 'China's Peaceful Rise: A Comparative Study', *The East Asia Institute Fellows Program*, 2009, Hlm 1. Diambil dari website <http://www.eai.or.kr/data/bbs/eng_report/2009052017544710.pdf> tanggal 10 Maret 2016

³ *Ibid*

⁴ Jackson, R dan Sorensen, G. (1999). *Introduction To International Relations*. New York, Oxford University Press. Halaman 68

⁵ *Ibid*, halaman 103

⁶ Dalam Realisme istilah *Power* didefinisikan dengan kapabilitas sebuah negara yang didalamnya termasuk ukuran-ukuran kekuatan ekonomi, militer, teknologi, diplomasi, dan kemampuan untuk menghapuskan atau menghancurkan bangsa lain. Lebih lanjut lihat Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi. *Realism: The State, Power, And The Balance Of Power. International Relation Theory: Realism, Pluralism, Globalism And Beyond*. (USA: Allyn & Bacon, 1999). Halaman 64

⁷ Qianqian Liu, 'China's Rise and Regional Strategy: Power, Interdependence and Identity', *Journal of Cambridge Studies*. Vol 5 no 4, hlm 78. Diambil dari website: <journal.acs-cam.org.uk/data/archive/2010/201004-article7.pdf>

“a dissatisfied great power will be likely to challenge the dominant state and it could possibly lead to conflicts and wars. China, accordingly, falls into this category.” (QianQian Liu, University of Cambridge)

Untuk mengurangi kecurigaan-kecurigaan yang muncul, pemerintah Cina mempromosikan sebuah pemahaman *“peaceful rise”*. Kalimat *“peaceful rise”* pertama kali diadopsi oleh Presiden *Hu Jintao* dan Perdana Menteri *Wen Jiabao* dalam pidato-pidato nya sekitar awal 2004.⁸ Artinya bahwa bangkitnya Cina akan berbeda jika dibandingkan dengan negara *superpower* lainnya, kebangkitan Cina akan dilihat sebagai sebuah kesempatan dibanding sebuah ancaman bagi dunia internasional.⁹ Nyatanya Cina memiliki banyak persoalan menyangkut kepentingan nasionalnya yang bertabrakan dengan visi kawasan Asia atau Asia Tenggara yang lebih melihat Cina sebagai salah satu negara yang mengancam kestabilan politik kawasan.

1.2 Identifikasi Masalah

Berkembangnya sebuah negara dapat dilihat dari kaca mata ekonomi dan militer. Cina secara umum memenuhi asumsi tersebut. Tetapi juga negara harus selalu berinteraksi dengan negara lain sebagai aktor rasional dalam sistem internasional yang ada, dengan tujuan menjaga kepentingan nasionalnya tetap dapat dipenuhi tanpa harus dicapai dengan pertikaian senjata. Walaupun dalam sejarah bangsa-bangsa, pertikaian senjata antara negara selalu mewarnai dunia politik kita.

⁸ Jisi Wang. *Op Cit.* Halaman 2

⁹ *Ibid.*

Dalam konteks regional Asia Tenggara, negara-negara periperal seperti Indonesia, Singapura, Vietnam dan lainnya melihat perkembangan ekonomi dan terbukanya hubungan diplomatik China dapat menjadi keuntungan yang luar biasa. Hubungan dagang dan politik yang terjalin menunjukkan keselarasan negara-negara Asia dalam mencapai tujuan utamanya yaitu perdamaian, atau setidaknya menurut ASEAN adalah terciptanya *regional stability*. Stabilitas kawasan adalah salah satu yang diharapkan oleh negara anggota ASEAN kepada China sebagai *regional superpower*, kemampuan ekonomi dan pengaruh politiknya dalam kawasan dipercaya dapat menjadi tumpuan bagi Asia Tenggara dalam menghadapi isu-isu internasional kontemporer. Tetapi disisi lain aktifitas politik China dapat dilihat sebagai ancaman bagi stabilitas itu sendiri. Kuatnya pengaruh politik China dalam kawasan Asia pada saat ini menimbulkan berbagai dinamika dan polemik politik bagi negara-negara tetangganya, dengan kata lain China dapat dilihat seperti koin dengan dua sisi berbeda. Terkait dengan penelitian ini bangkitnya China akan dilihat melalui perspektif regional terhadap China dan dampak dari kasus-kasus teritorial yang tengah China hadapi.

Dalam beberapa kesempatan China melibatkan dirinya pada perebutan wilayah dan sengketa kedaulatan, dan hampir disetiap kesempatan itu pula pemerintah China menggunakan pendekatan koersif terhadap lawannya seakan memperlihatkan kemampuan untuk mencegah atau menakuti lawan dalam mengklaim hal yang diperebutkan. Kemampuan China untuk melakukan *deterrence* kepada lawan politiknya dianggap serius bagi negara-negara periperal di Asia. Muncul ketakutan bahwa pertumbuhan ekonomi China juga akan meningkatkan

kapabilitas militernya dalam segala sisi (darat, laut dan udara), usaha peningkatan kapabilitas militernya inilah yang akan menyeret Asia Tenggara kedalam situasi *security dilemma*¹⁰. Kekhawatiran negara-negara kawasan Asia Tenggara membentuk perspektif negatif terhadap China, pemerintahan China berusaha meyakinkan komunitas internasional agar tidak khawatir dalam melihat perkembangan kekuatan ekonomi dan politik China di dunia, dan seperti yang disampaikan oleh Presiden *Hu Jintao* China berkembang dalam dan dengan tujuan damai, diekspresikan dalam kalimat *heping jueqi* atau “*Peaceful Rise*” yang kemudian diubah menjadi *heping fazhan* atau “*Peaceful Development*”.¹¹ Bagi kalangan akademisi hubungan internasional, perspektif paranoid terhadap China diungkapkan dalam teori ancaman China. Teori ini melihat bahwa perkembangan ekonomi, politik dan militer China dapat mengancam kestabilan sistem internasional yang ada, khususnya kawasan Asia Timur¹² karena keterlibatan China terhadap isu-isu teritorial dapat mengganggu kedaulatan negara tetangganya.¹³ Pemerintah China menekankan bahwa tidak ada motif apapun yang mengancam stabilitas perdamaian regional atau internasional dan mengeliminasi pandangan “*China Threat Theory*” yang muncul di kalangan akademisi.

¹⁰ Keadaan dimana dua negara atau lebih terlibat konflik atau perang dengan tujuan menciptakan keamanan dan konflik tersebut muncul karena timbulnya kecurigaan antar kedua negara tersebut yang menciptakan rasa tidak aman/*insecure* dengan hubungan antar negara tersebut, terlebih jika ada tindakan militer atau diplomasi tertentu antar negara-negara yang bersangkutan

¹¹ Jisi Wang. *Op Cit.* Halaman 4

¹² Dalam hal ini kawasan Asia meliputi negara-negara Asia Tenggara dan Utara (Jepang, Korea Selatan)

¹³ *What is 'China Threat' theory*, 2010, diambil dari website

<http://www.chinadaily.com.cn/opinion/2010-09/09/content_11277503.htm> tanggal 10 Maret 2016.

Konflik dimana China memegang peran sentral adalah kasus Laut China Selatan. Melihat kebelakang, kasus ini mulai mencuat dan menjadi agenda setiap perundingan masalah di kawasan adalah ketika China menerapkan ‘*nine dash borderline*’ yang memotong Zona Ekonomi Eksklusif negara Filipina dan Thailand. Didasari dengan catatan historis bahwa China telah menguasai perairan tersebut dengan kapal-kapal dagangnya, argumen utamanya adalah kepulauan *Spratly* dan *Paracel* telah digunakan oleh nelayan dan pedagang dari China untuk beraktifitas dan berlindung dari badai.¹⁴ Konsep ‘*nine dash line*’ tersebut muncul pada tahun 1947 pada peta yang dikeluarkan oleh pemerintah Nasionalis Cina, yang kemudian diadopsi oleh partai Komunis sampai klaim pada saat ini.¹⁵ Persengketaan wilayah perairan ini menimbulkan ketegangan antara negara-negara Asia Tenggara. Sengketa ini diwarnai serangkaian tindakan agresif Cina terhadap beberapa negara tetangganya seperti serangan terhadap angkatan laut Vietnam di kepulauan *Paracel* tahun 1974¹⁶, dan kepulauan *Spratly* tahun 1988 yang menewaskan 64 penjaga perbatasan Vietnam¹⁷, dan insiden *Mischief Reef* pada 1995 yang melibatkan angkatan laut Cina dan nelayan Filipina.¹⁸ Serangkaian kejadian tersebut berujung

¹⁴ Amit Singh, ‘South China Sea Dispute, A New Area of Global Tension’, *National Maritime Foundation*, 2011, hlm 2. Diambil dari <http://www.maritimeindia.org/South%20China%20Sea%20Dispute,%20A%20New%20Area%20of%20Global%20Tension%20by%20Amit%20Singh.pdf> tanggal 12 Maret 2016.

¹⁵ Peter Dutton, ‘Three Disputes and Three Objectives, China and South China Sea’. *Naval War College Review*. Vol 64, No. 4, 2011, hlm 44. Diambil dari: http://home.comcast.net/~lionelingram/592_DisputesandThreeObjectivesChina.pdf 8 Maret 2016.

¹⁶ Paul N. Hung, ‘Vietnamese patriots remember “heroes” China’s attack against the Spratlys’. *AsiaNews*. Diakses dari website: <http://www.asianews.it/news-en/Vietnamese-patriots-remember-heroes-killed-during-China's-attack-against-the-Spratlys-24251.html> tanggal 6 Maret 2016

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ Peter Dutton. *Op Cit*, halaman 43

dengan lahirnya persetujuan *Declaration of Conduct* dengan pemerintah Cina pada tahun 2002 yang dikeluarkan oleh ASEAN (Association of Southeast Asian Nations).¹⁹ Dengan harapan hal ini menjadi langkah awal untuk menghambat eskalasi konflik yang terjadi antara Cina dengan beberapa negara anggota ASEAN.

Sebagai sebuah negara yang sedang bertumbuh dan menjelma sebagai negara *superpower* baru pada abad 21 ini, Cina memiliki kepentingan nasional yang akan sangat mempengaruhi perpolitikan kawasan. Istilah diplomasi “Peaceful Rise” atau “Peaceful Development” akan dipertanyakan jika Cina terus mengandalkan kekuatan militer dan paksaan untuk mencapai tujuan nasionalnya. Dalam penelitian ini khususnya, menarik untuk melihat upaya Cina dalam menghadapi dua persoalan kunci dalam mengejar kepentingan nasionalnya di Asia Tenggara.

1.2.1 Pembatasan Masalah

Penulis akan membatasi penelitian ini pada Cina dalam menerapkan strateginya untuk memaksimalkan kekuatan atau dominasinya terhadap Vietnam dan Filipina, sebagai aktor utama dalam kasus persengketaan wilayah perairan Laut Cina Selatan untuk menegaskan status *super power* nya di kawasan.

1.2.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian terhadap masalah diatas, maka penulis akan merumuskan masalah sebagai berikut: “Bagaimanakah strategi Cina dalam

¹⁹ *Loc Cit.*

memaksimalkan *power* nya untuk menegaskan statusnya sebagai regional hegemon, terhadap Vietnam dan Filipina dalam kasus Laut Cina Selatan?”

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

2.1.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana strategi Cina untuk memaksimalkan *powernya* terhadap Vietnam dan Filipina di Laut Cina Selatan.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan menjadi pertimbangan referensi bagi akademisi yang ingin mengetahui atau mendalami peran Cina dan konflik wilayah yang dihadapinya sebagai salah satu negara *superpower* di kawasan Asia. Penulis berharap penelitian ini menjadi salah satu sumbangan bagi dunia pendidikan Hubungan Internasional.

1.4 Kajian Literatur

Penelitian ini didasari oleh jurnal akademik *Peter Dutton* yang berjudul ‘*Three Disputes and Three Objective, China and the South China Sea*’. *Peter Dutton* adalah direktur studi maritim Cina di *Naval War College*. Jurnal ini merupakan analisis beliau mengenai kepentingan Cina di konflik Laut Cina Selatan yang seperti pada judulnya, dirangkum dalam tiga tujuan mengapa Cina konsisten memaksakan klaimnya di konflik sengketa ini. Penulisan jurnal ini mengandung perpektif Amerika. Sebagai negara dominan di kawasan yang lain,

perspektif yang berasal dari luar Asia akan membantu menganalisa perilaku Cina sebagai negara dominan di kawasan ini.

Sumber lain adalah sebuah buku laporan dari *Strategic Studies Institute* yang isinya merupakan serangkaian artikel dan pandangan mengenai implikasi strategis bangkitnya Cina terhadap kawasan atau komunitas internasional dan juga Amerika Serikat. Buku ini dikompilasi oleh Dr. *Carolyn Pumphrey* dari *U.S Army War College*. Kontributor artikel-artikel ini adalah partisipan konferensi *Cape Hill* di *North Carolina* pada Maret 2001 yang membahas dampak keamanan dari kebangkitan Cina. Konferensi ini disponsori oleh *U.S Army War College*, *Triangle Institute for Security Studies*, dan *Duke University's program in Asia Security Studies*.

1.5 Kerangka Pemikiran

Dalam sebuah penelitian, kerangka pemikiran berfungsi sebagai acuan dasar yang akan mengkaitkan fakta-fakta dari sumber penelitian dan relevansinya untuk menghasilkan sebuah analisa yang nantinya akan menjawab pertanyaan penelitian.

Penelitian ini akan menggunakan teori *Offensive Realism* dari *John Mearsheimer* untuk memetakan konsep politik internasional seputar tema penelitian. Realis memiliki asumsi utama yang menyatakan hubungan internasional bersifat anarki, selalu berpotensi konfliktual dan perang adalah konsep yang akrab dalam sistem anarki ini. Negara adalah aktor utama dan rasional, aktor lain seperti individu atau organisasi internasional dianggap kurang signifikan dalam sistem internasional. Sebuah negara dianggap sebagai pelindung wilayahnya, pelindung

populasinya dan pelindung cara hidup masyarakatnya.²⁰ Dalam sistem internasional menurut Realis terdapat suatu hirarki yang membedakan negara-negara berdasarkan *power* yang dimilikinya. Sistem hirarki dan anarki ini menempatkan prioritas atau kepentingan nasional sebuah negara adalah mencapai keamanan nasional dan keberlangsungan hidup negara.²¹ *Offensive Realism* mengambil beberapa asumsi dasar dari Realisme klasik seperti diatas, dan juga berangkat dari pemahaman sebuah struktur politik internasional yang dikemukakan oleh teori *Kenneth Waltz* yang akan kita bahas dibawah.

Offensive Realism memiliki lima asumsi dasar.²² Pertama, politik internasional terjadi didalam absennya pemerintahan di atas pemerintahan yang dapat menegakan peraturan dan menghukum negara. Kedua, sebuah negara tidak dapat mengetahui secara pasti niat dan perilaku negara lain. Ketiga, tujuan negara adalah untuk *survive*, maka *survival* merupakan prioritas negara dalam politik internasional dan menjaga integritas dan kedaulatan negara adalah prasyarat untuk mencapai semua tujuan. Keempat, negara adalah entitas rasional yang artinya negara selalu berpikir strategis mempertimbangkan keadaan eksternal dan memilih keputusan yang memaksimalkan kebutuhan dasarnya untuk *survive*. Kelima, negara selalu memiliki kapabilitas militer yang memungkinkan mereka untuk menciptakan konflik terhadap negara lainnya.

²⁰ Jackson, R dan Sorensen, G. *Op Cit.* Halaman 68

²¹ *Ibid*, halaman 68-70

²² Peter Toft, 'John J. Mearsheimer: an offensive realist between geopolitics and power'. Diakses dari website <<http://link.springer.com/article/10.1057/palgrave.jird.1800065>> tanggal 5 Maret 2016.

Mearsheimer berpendapat sebuah negara akan terus berusaha mendapatkan *power* untuk menjamin keberlangsungannya, dan pada akhirnya mencapai status hegemon dalam sistem adalah jalan terbaik untuk *survive* (dalam hal ini hegemon regional). Hegemon adalah keadaan dimana suatu negara telah menjadi sangat kuat dan tidak ada negara lain yang dapat menyeimbangkan kekuatan militernya sehingga dapat mendominasi negara-negara lain di sistem.²³ Alasan lain adalah karena sebuah negara mengidamkan rasa aman bagi dirinya, terlebih karena hubungan antar negara adalah hubungan penuh dengan kecurigaan dan rasa takut satu sama lain. Rasa takut ini membuat negara harus dapat menolong dirinya sendiri (*self help*) untuk dapat bertahan ditengah-tengah rasa takut akan ancaman dari negara lain. Disinilah dapat dikatakan bahwa sebuah sistem internasional yang anarki berpengaruh besar terhadap perilaku negara dan begitu pula sebaliknya. Jika didefinisikan menurut pandangan Realisme kata anarki berarti absennya bentuk otoritas apapun di atas negara.²⁴ Absennya bentuk otoritas ini menyebabkan negara-negara yang ada lebih mengandalkan konsep *power* dan berusaha untuk memelihara atau mencapai posisi yang lebih baik dalam hubungan antar negara.²⁵ Sistem anarki ini menjelaskan situasi hubungan antar negara yang penuh curiga. Kecurigaan-kecurigaan ini membuahkan motif bagi sebuah negara untuk mempertahankan diri dengan mempersenjatai diri, menyambung pada asumsi kelima teori *Offensive Realism* diatas bahwa negara pasti memiliki kekuatan militer. Karena dalam teori

²³ Art, J.R dan Jervis, R. *International Politics: Enduring Concepts and Contemporary Issues*. (USA: Pearson, 2011). Halaman 65.

²⁴ Viotti, P. R dan Kauppi, M.V. *Realism: The State, Power, And The Balance Of Power. International Relation Theory: Realism, Pluralism, Globalism And Beyond*. (USA: Allyn & Bacon, 1999). Halaman 68-69.

²⁵ *Ibid*

ini, sebuah negara melihat negara lain sebagai ancaman yang berpotensi mematikan. Walaupun mungkin tindakan mempersenjatai diri tersebut murni dengan alasan untuk mempertahankan diri, hubungan yang penuh dengan kecurigaan mengeliminasi kemungkinan tersebut. Sistem anarki ini secara tidak langsung menimbulkan sebuah *security dilemma*, dimana negara lain yang melihat motif tersebut sebagai sebuah ancaman dan merespon dengan ikut mempersenjatai dirinya dengan motif yang sama.²⁶

Sementara di abad 21 ini terlepas dari sistem internasional bipolar pada era Perang Dingin, dunia internasional telah bertransformasi ke dalam hubungan saling ketergantungan dan sistem internasional multipolar. Faktanya fokus hubungan antar negara bergerak ke arah kerjasama ekonomi. Kelompok Realisme sepakat bahwa hubungan antar negara merupakan sebuah perebutan kekuatan (*power struggle*), hubungan *interdependence* lebih merupakan hubungan *dominance-dependence* karena hubungan *interdependence* tidak berarti bahwa status antar negara adalah sejajar (terdapat sistem hirarki kekuatan dalam sistem internasional) karena sekali lagi pada dasarnya sistem internasional adalah anarkis.²⁷ Perilaku unit dalam sistem dibatasi oleh lingkungan politik internasional unit tersebut berada, yang juga membentuk motivasi dan perilaku negara karena negara hanya memiliki satu tujuan, untuk *survive*. *Mearshimer* melihat sebuah upaya negara mencari *power* adalah untuk memaksimalkannya sehingga negara tersebut mendominasi sistem. Perilaku negara dilihat *Mearshimer* lebih agresif dikarenakan sistem

²⁶ *Ibid*

²⁷ *Ibid*, halaman 76

internasional yang telah menjadi multipolar. Dan karena negara buta akan niat dari negara lain, yang selalu melihat negara lain sebagai ancaman, jalan terbaik sebuah negara untuk *survive* adalah menjadi negara yang paling kuat di sistem.²⁸

Dalam pespektif Realisme situasi damai atau yang lebih dikenal dengan istilah “stabilitas” dapat terjadi bila terdapat keseimbangan kutub kekuatan dunia atau lebih dikenal dengan konsep *balanced of power*.²⁹ Dalam sistem *interdependency* Realisme melihat perdamaian terjadi bukan karena terciptanya kondisi hubungan saling bergantung antar negara-negara, melainkan adanya kondisi dimana terdapat *hegemonic stability*³⁰. Kondisi ini terjadi ketika satu negara dominan atau *superpower* dianggap sebagai pemimpin dalam skala global,³¹ dengan contoh negara Amerika Serikat khususnya sejak Uni Soviet runtuh dan berakhirnya era Perang Dingin. Disisi lain, perang dalam sistem internasional yang anarkis tetap menjadi kemungkinan besar, khususnya jika melihat sistem dunia yang multipolar saat ini. Menurut teori *Offensive Realism* diatas bahwa negara akan terus memaksimalkan *power*-nya dengan tujuan mencapai status hegemon, dan konsep tersebut berlaku dalam skala regional atau global. Tetapi terdapat kesulitan untuk mengukur sebuah hegemoni global karena jika dilihat dari satu negara yang misalnya mencapai status tersebut, karena secara geografis terlalu luas untuk mencakup seluruh dunia.³² Maka *Mearsheimer* memfokuskan pada cakupan hegemoni regional dan pada dasarnya menjadi tujuan prinsip dan strategi sebuah

²⁸ Art, J.R dan Jervis, R.. *Op Cit.* Halaman 61

²⁹ Jackson, R dan Sorensen, G. *Op Cit.* Halaman 103

³⁰ Viotti, P. R dan Kauppi, M.V. *Op Cit.* Halaman 78-79

³¹ *Ibid*

³² Peter Toft. *Op Cit.*

negara. Secara istilah hegemoni sendiri dapat dilihat sebagai perluasan pengaruh atau kekuasaan suatu negara ke negara atau kawasan lainnya.³³ Pengaruh itu sendiri dapat dimasukkan ke dalam perspektif ekonomi, politik bahkan militer. Pada topik penelitian ini misalnya, Cina berupaya mempertahankan dan terus memperluas pengaruhnya pada negara-negara tetangganya khususnya di Asia Tenggara, seperti Filipina dan Vietnam. Upaya Cina tersebut merupakan *struggle of power* untuk tetap berada pada puncak kekuatan politik diantara negara-negara satelitnya. Ini merupakan praktek politik sebuah negara yang berstatus *powerful* seperti Cina diantara negara-negara yang relatif lebih lemah seperti Vietnam dan Filipina.

Konsep strategi sendiri merupakan topik yang cukup diperdebatkan oleh banyak pemikir, karena penggunaan kata strategi itu sendiri tidak menjelaskan apakah terkandung unsur militer atau bersifat umum.

Menurut *Colin Gray* strategi merupakan jembatan yang menghubungkan kemampuan militer untuk tujuan politik,³⁴ definisi tersebut erat kaitannya dengan pemikiran *Carl von Clausewitz* yang menuliskan strategi adalah seni pertempuran dalam perang. *Colin* mengembangkan pemikiran ini karena dianggap terlalu sempit dan terbatas hanya dalam situasi peperangan. *Liddell Hart* juga menyatakan definisi yang serupa dengan *Clausewitz*, tetapi diperkaya dengan pendapat bahwa peran *grand strategy* adalah untuk mengelola dan mengerahkan sumber daya negara atau beberapa negara untuk mencapai tujuan politik dalam masa perang. Definisi lain datang dari *J. C. Wylie*, strategi adalah perencanaan aksi yang bertujuan mencapai

³³ Jack C. Plano dan Roy Olton, *Kamus Hubungan Internasional*, hlm 204

³⁴ Colin S. Gray, *Modern Strategy*, New York, Oxford University Press, 1999, hlm 17.

sesuatu, sebuah tujuan bersama yang ditentukan dengan suatu sistem pengukuran untuk mencapainya. Definisi *Wylie* adalah definisi strategi yang paling luas karena dianggap seimbang, cakupan maknanya dapat diterapkan dalam kondisi perang dan damai. Sedangkan definisi *Liddel Hart* dan *Clausewitz* erat kaitannya dengan peperangan mengingat latar belakang militer yang kental dalam kedua penulis ini.

Untuk mencapai kedudukan hegemoni regional menurut teori ini, terdapat dua strategi.³⁵ Strategi pertama adalah memperoleh *relative power* secara langsung, menurut *Mearsheimer* perang secara prinsip merupakan cara negara untuk meningkatkan *power*-nya, jika pertimbangan keuntungan yang akan didapat melebihi kerugian. Dalam buku *Stephen Van Evera (The Causes of War)*, *Thomas Schelling* mengemukakan konsep-konsep penyebab perang sebagai berikut:³⁶

- Perang mungkin terjadi bila sebuah negara percaya pada optimisme palsu akan hasil dari perang itu sendiri.
- Perang mungkin terjadi bila terdapat sebuah keuntungan strategis untuk memobilisasi atau menyerang lebih dulu.
- Perang mungkin terjadi bila terdapat negara dengan kapasitas kekuatan yang signifikan, dan terdapat peluang dan kerapuhan dari lawan.

³⁵ Peter Toft. *Op Cit.*

³⁶ Lebih lanjut lihat Evera, S.V. Introduction; Arguments Advanced, Answers Offered. *Causes Of War*. (New York: Cornell University Press, 1999). Halaman 4

- Perang mungkin terjadi ketika sumber daya yang diperlukan sangat memadai, yaitu ketika kontrol terhadap sumber daya memungkinkan negara untuk melindungi atau menguasai sumber daya lain.
- Perang mungkin terjadi bila penaklukan mudah.

Tetapi bahkan di bawah situasi politik yang bersifat hegemon, hubungan antara negara yang kuat dan yang lemah tidak selalu bersifat konflikual, misalnya hubungan Cina dengan Taiwan atau dengan Indonesia dan juga Singapura. Hubungan Cina dengan negara-negara ini lebih dipenuhi dengan kerjasama ekonomi dan investasi positif ke perekonomian masing-masing negara yang terus berkembang.

Probabilitas terjadinya perang dapat dibatasi dengan melihat distribusi kekuatan yang terjadi antara negara-negara atau aliansi tertentu,³⁷ hal ini juga dapat dilihat sebagai batasan perilaku negara dalam sistem anarki. Jika suatu negara melakukan agresi terhadap negara rival atau perang dan mencapai kemenangan, kesuksesan ini akan menyebabkan hilangnya kekuatan negara rival yang menciptakan rasa aman bagi pihak agresor. Cara lain negara mendapatkan *power* adalah taktik *bait and bleed*, yang membiarkan dua atau lebih negara rival berperang satu sama lain, sedangkan pihak kita mengakumulasi kekuatan militer sebelum ikut terlibat. Taktik ini lebih bersiko karena hasil dari peperangan yang tidak menentu akan berujung pada skenario dimana negara rival mencapai kesuksesan dan pihak kita terekspos untuk menghadapinya tanda sekutu.

³⁷ Viotti, P. R dan Kauppi, M.V. *Op Cit.* Halaman 67

Strategi kedua adalah mendapatkan *power* secara tidak langsung, yang melibatkan pencegahan negara rival melakukan hal yang sama. Artinya sebuah negara dapat melakukan akumulasi kekuatan militer secara internal atau membentuk aliansi dengan negara lain sebelum potensi agresi negara rival dapat terealisasi. Langkah ini dapat dilihat dari kaca mata Realisme sebagai *balancing the power*. Mearsheimer menambahkan dalam hal ini terdapat keuntungan bagi suatu negara untuk “memberikan beban” kepada negara aliansi untuk mengatasi pihak agresor, dengan nama lainnya adalah *buck passing*. *Buck passing* dianggap menguntungkan karena jika konflik benar-benar pecah, negara yang “memberikan beban” dapat menjadi penonton tanpa mengalami kerugian apapun, tetapi juga menjadi resiko bila negara yang “diberikan beban” kalah dalam menghadapi pihak agresor.

Keadaan anarkis dalam sistem internasional membawa negara-negara dalam kondisi yang kompetitif, saling curiga, dan berkonflik.³⁸ Absennya perlindungan dari sistem internasional itu sendiri memaksa negara-negara menjaga kepentingannya masing-masing. Jika suatu negara tidak memiliki cukup *power*, negara tersebut akan beraliansi dengan negara yang lebih kuat untuk mendapat jaminan perlindungan.³⁹ Sedangkan negara besar seperti Cina, kebijakan luar negerinya berfokus pada bagaimana menjaga status *superpower* nya dalam panggung politik internasional dan menjadi pengimbang negara *superpower*

³⁸ Ryan K. Beasley et al., *Foreign Policy in Comparative Perspective Domestic and Internanal Influences on State Behaviour*, Amerika Serikat, CQ Press, 2013, Halaman 8

³⁹ *Loc Cit*

lainnya.⁴⁰ Bagi negara-negara kelas menengah, Realisme berpendapat bahwa dalam sistem internasional multipolar negara kategori ini memiliki otonomi dan pengaruh yang lebih baik di kawasan karena memiliki variasi pilihan yang lebih banyak untuk menjalin aliansi dan membentuk kebijakan luar negrinya, walaupun terdapat kekhawatiran terhadap negara-negara *superpower* akan dominasinya pada sistem internasional dan mengesampingkan kepentingan negara kelas menengah dan kecil.⁴¹

1.6 Metode dan Teknik Pengumpulan Data

1.6.1 Metode Pengumpulan Data

Metode penelitian yang akan digunakan adalah metode kualitatif, penulis akan menekankan pada pemahaman terhadap fenomena atau kejadian yang akan diteliti. Penelitian akan mengolah data-data secara deskriptif, karena penulis akan berusaha memahami dan mengeksplorasi makna dari masalah yang terjadi.

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data akan dilakukan dengan menggunakan studi dokumen atau metode sekunder dalam penelitian. Peneliti akan mendapatkan akses sumber penelitian dari media komunikasi massa seperti buku, jurnal, dan media internet.

⁴⁰ *Loc Cit*

⁴¹ *Ibid*, halaman 8-9

1.7 Sitematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, penulis akan menyampaikan penelitian dengan susunan sebagai berikut:

Bab I, berisi tentang latar belakang penelitian, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, dan metode penelitian.

Bab II, berisi penelitian tentang posisi Vietnam dan Filipina serta relasinya dengan Cina sepanjang persengketaan batas-batas wilayahnya, diikuti dengan penjelasan mendalam mengenai kandungan strategis yang terdapat Laut Cina Selatan dan kepentingan strategis Vietnam-Filipina di wilayah ini.

Bab III, penelitian tentang analisis strategi Cina sebagai hegemon dalam konflik Laut Cina Selatan terhadap Vietnam dan Filipina.

Bab IV, akan berisi kesimpulan yang diambil dari penelitian ini.